

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PEMBERIAN
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2006
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KUANTAN HILIR)**

Oleh :

SARJAN M,¹

**Fakultas Ilmu Sosial
Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi
sarjanvivo@gmail.com**

**Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan
Singingi,
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006 di Kecamatan Kuantan Hilir. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006 di Kecamatan Kuantan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*tringuluasi*) yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran situasi serta analisis berdasarkan hitungan angka dan data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur ukur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat berpartisipasi politik dalam pemberian suara. Sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan maka secara sederhananya maka penulis akan melihat dari beberapa faktor yaitu Faktor Sosial Budaya, Faktor Lingkungan Keluarga, dan Faktor Ekonomi dan Pendidikan.

Kata kunci : Partisipasi, Politik, Masyarakat Desa

ABSTRACT

This research discusses how the participation of rural communities in voting in the Direct Regional Head Election of Kuantan Singingi Regency in 2006 in Kuantan Hilir District. The purpose of this research is to describe and analyze the factors that influence the political participation of rural communities in voting in the 2006 Direct Regional Head Election of Kuantan Singingi in Kuantan Hilir District. This research uses quantitative and qualitative methods (triangulation) using descriptive analysis approach, which is a method that provides an overview and exposure to phenomena or situation descriptions and analysis based on a count of numbers and existing data. Then proceed by interpreting as a flow chart to explain and analyze on certain factors. Several factors cause people to participate politically in voting. In accordance with the conditions of rural communities, in simple terms the writer will see from several factors, namely Socio-Cultural Factors, Family Environmental Factors, and Economic and Educational Factors.

Keywords: Participation, Politics, Village Communities

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru 21 Mei 1998 silam dan ditandai lahirnya reformasi kepermukaan seantara bumi Nusantara lewat berbagai perjuangan organisasi mahasiswa telah terjadi bermacam pembenahan khususnya produk-produk politik. Agenda ini adalah upaya keinginan bersama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sempurna. Produk politik yang dilahirkan misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan disusul oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Nuansa demokrasi yang mulai lahir di awal era reformasi juga tergambar dari banyaknya partai politik peserta PEMILU 1999 yang kita kenal dengan istilah multi partai. Wacana demokratisasi tidak hanya sampai disitu, akan tetapi terus berjalan sesuai dengan tuntutan dan keinginan bersama para elit yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia melalui pembentukan dan pelaksanaan Undang-undang PEMILU secara langsung.

Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan PEMILU ini tidak serta merta berarti proses demokrasi di

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rus dan Althoff diatas dapat kita asumsikan bahwa semakin tinggi tingkatan atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya semakin ke bawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Apa yang telah dijelaskan Rus dan Althoff dari hierarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati dilingkungan masyarakat kita ialah

Indonesia juga berhasil atau terkonsolidasi. Hal ini diungkapkan oleh William Liddle yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Keharusan demokrasi tambah Liddle adalah menjadi sistem politik yang normal dalam kancan perpolitikan Indonesia sekarang ini (dalam Priyono, dkk, 2007:43-44). Salah satu pilar demokrasi menurut John Locke (1632-1704) adalah prinsip *trias politica* yang membagi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain (Budiardjo, 2004:151).

Dua di antara tiga prinsip *trias politica* di pilih secara langsung oleh rakyat yang lebih akrab dalam bahasa politik sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Sedangkan ukuran partisipasi politik menurut Mubyanto (1975:36) ialah keikutsertaan warga masyarakat untuk membuat keputusan politik yang menyangkut nasib mereka. Kemudian menurut Rush dan Althoff (1983), untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat pada kegiatan politik dapat dilihat berdasarkan hierarki partisipasi politik yang di ikuti oleh masyarakat.

pemberian suara pada PEMILU. Partisipasi politik dalam pemberian suara tersebut adalah dipilihnya secara langsung Anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut dalam konteks eksplisit dimuat dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah dan ditambah dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-undang tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/ kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peneliti LIPI Alfitra Salam menjelaskan bahwa apa yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan merupakan konsep yang menjadi rujukan dan untuk dilaksanakan secara arif dan bijak sana, karena Pilkada langsung sebagaimana yang telah dijelas pada rakyat kebanyakan. Beberapa daerah di Indonesia yang telah melaksanakan Pilkada langsung untuk jabatan Gubernur atau Bupati/walikota menyisakan banyak cacatan terhadap perkembangan dan keberlangsungan demokrasi. Satu di antara pilar yang disebutkan Sanit adalah kepentingan rakyat tenggelam oleh dominasi kepentingan para elit yang bertarung dalam Pilkada langsung tersebut (dalam AE Priyono dkk, 2007:74).

Dari pantauan dan pengamatan di beberapa daerah pemilihan di Kuantan Singingi atas laporan warga terdapatnya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada, misalnya ada isu *money politic*, intimidasi terhadap warga eks-transmigrasi dan masih banyak laporan pelanggaran lainnya (Panwas Pilkada Kuantan Singingi, 2006). Jika

Undang-undang di atas dituntut kearifan masyarakat lokal untuk berpartisipasi politik secara langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah, walaupun kekhawatiran sebagian kecil pakar hukum menilai masih terdapatnya kekurangan dalam peraturan tersebut. Dan yang pasti peraturan tersebut setidaknya telah mengantarkan pemilihan kepala daerah kepada pola dan mekanisme yang baru dan baik dari yang sebelumnya (Sarjan M. Tabloid Dayung Riau Edisi VII, 2005).

Salah satu daerah Kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung adalah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tepatnya pada tanggal 27 April 2006 lalu. Pilkada kali ini merupakan awal dari terciptanya demokratisasi dan budaya politik lokal dalam sistem perpolitikan Tanah Air di Kuantan Singingi. Menurut pakar politik Arbi Sanit, ada tiga golongan kepentingan dalam Pilkada langsung. Yaitu; (a) kepentingan elit politik nasional, (b) kepentingan elit politik lokal, dan (c) kepentingan

diprediksi dari 330 daerah Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah, Pilkada langsung di Kabupaten Kuantan Singingi penulis meyakini tergolong sukses tanpa ada kerusuhan dan konflik politik yang berlarut-larut seperti daerah lainnya di Indonesia. Ada salah satu fenomena masyarakat yang menarik perhatian penulis saat Pemilihan Kepala Daerah langsung di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil pengamatan penulis dilapangan terlihat bahwa masyarakat dari beberapa kawasan pedesaan di Kabupaten Kuantan Singingi ber-antusias untuk mengikuti pesta demokrasi lokal. Bentuk antusiasme masyarakat pedesaan adalah besarnya partisipasi politik masyarakat yang datang ke TPS dimana mereka terdaftar sebagai pemilih untuk pemungutan suara. Partisipasi politik masyarakat yang

sangat mudah di amati adalah pemberian suara atau hak pilih masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Peserta Pemilihan Kepala Daerah langsung di Kabuapten Kuantan Singingi tahun 2006 terdiri dari 4 Pasangan calon, yaitu; (1) pasangan H. Sukarmis-Mursini, (2) Asrul Ja'far-Mukhlis MR, (2) R. Erisman-Endrianto Ustha, (4) Suhardiman Amby-Bastian Rusli. Ke empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di atas terdiri dari berbagai profesi, ada dari birokrat, politisi dan pengusaha. Partisipasi politik masyarakat di Kuantan Singingi dalam pemberian suara terhadap masing-masing calon Bupati/wakil Bupati terdistribusi secara bervariasi. Tercatat dari empat pasangan calon yang menduduki peringkat tertinggi berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD adalah pasangan H. Sukarmis-Mursini dengan total perolehan 61.679 suara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil keputusan KPUD Kabupaten Kuantan Singingi, menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat pedesaan yang cukup tinggi dalam pemberian suara adalah di Kecamatan Kuantan Hilir dan pada Pemilu 2004 Kecamatan Kuantan Hilir merupakan daerah pemilihan wilayah empat yang terdiri dari lima kecamatan. Untuk lebih jelasnya perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat di 12 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel rekapitulasi perhitungan suara KPUD Kuantan Singingi.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi cukup tinggi. Terlihat dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa partisipasi politik masyarakat di urutan tertinggi adalah di Kecamatan Kuantan Hilir, yaitu 84,09 % atau 14.024 pemilih yang memberikan suara dengan jumlah pemilih 16.667 orang. Sedangkan untuk

kategori pelanggaran dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi bahwa untuk Kecamatan Kuantan Hilir menurut informasi yang penulis dapatkan tidak terdengar adanya pelanggaran baik bersifat intimidasi,

money politic maupun pengelembungan suara (Panwas Kec. Kuantan Hilir, 2006).

Partisipasi politik dalam pandangan Huntington dan Nelson (1948) bahwa untuk kategori masyarakat pedesaan lebih dipengaruhi oleh rasa solidaritas antar sesama. Pendapat ini juga didukung oleh Amir (1997), Anwar (1997) dari penelitian yang mereka lakukan setidaknya ada beberapa nilai yang menyebabkan masyarakat pedesaan berpartisipasi, yaitu; (1) rasa persatuan dan kecintaan, (2) persaudaraan, (3) penghormatan atau ketaatan, (4) penyesuaian dan (5) kepekaan pada tanggungjawab (Model Usulan Penelitian A.A Arsyad dalam K. Garna, 2000:92).

Dengan demikian, lima nilai diatas secara sosial-budaya di sebut Ferdinand Tonnies sebagai masyarakat yang bersifat *gemeinschaft* yaitu adanya kehidupan bersama, dimana antar anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang bersifat nyata dan organis terutama dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan dan sebagainya pada masyarakat yang homogen (dalam Narwoko dan Suyanto, 2004:33).

Kecamatan Kuantan Hilir yang melingkupi dua Kenegerian Adat yang membawahi beberapa desa dan masyarakatnya yang homogen dengan sistem kekerabatan yang bersifat *gemeinschaft* (persaudaraan dan solidaritas antar sesama) distribusi suara pada Pilkada Kuantan Singingi tahun 2006 juga bervariasi. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel I.2
Perbandingan Suara Berdasarkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil
Bupati di Dua Kenegerian Kecamatan Kuantan Hilir

No. Urut Pasangan Calon	Kenegerian		Kec. KH. Hilir
	Koto Tuo	Koto Rajo	
(1) Sukarmis-Mursini	1.990	283	2.273
(2) Asrul Ja'far-Mukhlis MR.	1.979	1.196	3.175
(3) R. Erisman-Endrianto Ustha	6.621	438	7.059
(4) Suhardiman Amby-Bastian Rusli	1.760	192	1.955
Jumlah Suara			14.024

Sumber Data : KPUD Kuantan Singingi Tahun 2006

Dari tabel di atas, bahwa untuk Kenegerian Koto Tuo suara tertinggi di raih oleh pasangan R. Erisman-Endrianto Ustha sebesar 6.621 suara, di urutan kedua disusul pasangan Sukarmis-Mursini dengan perolehan suara 1.990, seterusnya pasangan Asrul Ja'far-Mukhlis MR. 1.979 suara dan Suhardiman Amby-Bastian Rusli 1.760 suara. Sedangkan di Kenegerian Koto Rajo untuk urutan pertama pasangan Asrul Ja'far-Mukhlis MR dengan perolehan 1.196 suara, urutan kedua pasangan R. Erisman-Endrianto Ustha sebesar 438 suara, pasangan Sukarmis-Mursini di urutan ke tiga yang perolehan suaranya 283 dan urutan terakhir Suhardiman Amby-Bastian Rusli 192 suara.

Disamping dipengaruhi oleh faktor keluarga dan sosial kultural menurut Erbe (1964) dan Hansen (1975) bahwa keadaan ekonomi dan pendidikan berindikasi mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Dari hasil wawancara dengan sebagian masyarakat pedesaan menyebutkan ekonomi masyarakat lebih dari cukup, walaupun sebelum pelaksanaan Pilkada dimulai dengan

adanya bantuan-bantuan dari pasangan calon kepada masyarakat. (Sutrisno, Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi). Sedangkan dari sektor pendidikan formal, masyarakat pedesaan di Kecamatan Kuantan Hilir mayoritas berpendidikan menengah kebawah, akses informasi tentang isu-isu politik lokal sangat terbatas. Isu-isu politik yang berkaitan tentang Pilkada langsung hanya mereka peroleh dari pendidikan politik warung kopi atau sosialisasi politik pasangan calon maupun pihak-pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi masyarakat disaat mendekati Pilkada langsung.

Besarnya partisipasi politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta bervariasinya tingkatan pemberian suara oleh masyarakat pedesaan terutama di dua Kenegerian yang terdapat di Kecamatan Kuantan Hilir, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **"Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006 (Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Hilir)"**. masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada Pilkada langsung Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Kuantan Hilir tidak terlepas dari perilaku sosial politik masyarakat itu sendiri maka masalah ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan "Faktor-Faktor Apakah Yang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penuliskan jelaskan di atas, dan besarnya partisipasi politik

Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006 Di Kecamatan Kuantan Hilir?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006 di Kecamatan Kuantan Hilir.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*triangulasi*) yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan terhadap fenomena ataupun gambaran

D. Manfaat Penelitian

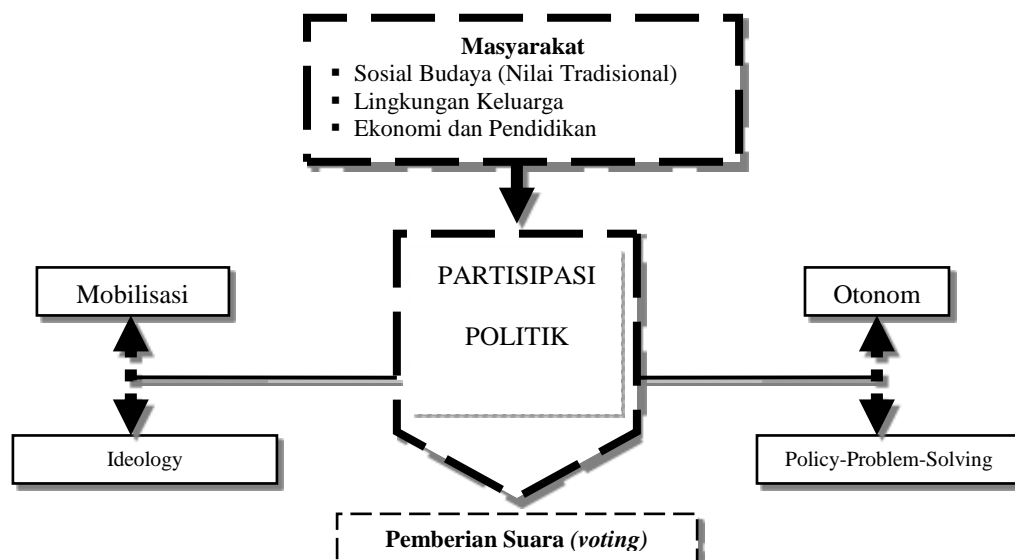
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan ilmu sosial dan politik khususnya “Studi Manajemen Pemerintahan Daerah”.
2. Sebagai bahan tambahan dan masukan terhadap wacana demokratisasi politik lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung di Kabupaten/Kota Khususnya Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan masukan bagi peneliti

situasi serta analisis berdasarkan hitungan angka dan data-data yang ada. Kemudian diteruskan dengan melakukan interpretasi sebagai alur ukur untuk menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah yang diteliti dan terakhir berusaha memprediksinya. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field*).

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar I.3
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Erbe (1964,) Hansen (1975), Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1948), Keith Davis (1962), Rush dan Althoff (1983), dan Firmanzah (2007).

LANDASAN TEORI

A. Demokrasi dan Demokratisasi

kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Disamping itu demokrasi juga salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara (<http://www.blogspot.com/2007/demokrasi.htm>).

Misalnya J. Locke dan Rousseau berpendapat bahwa suatu lembaga politik harus mampu menjamin adanya kebebasan, persamaan (*equality*), kekuasaan hukum dan sistem perwakilan rakyat dalam parlemen. Konsep bebas yang dimaksudkan mereka adalah diberikan secara bebas, tanpa paksaan dan ancaman, tanpa kekerasan dan intimidasi untuk menyatakan pendapat dan bertemu muka (Kartono, 1996:156).

Ilmuan lain seperti Joseph Schumpeter (1883-1950) secara sederhana mendefinisikan demokrasi sebagai mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik. Demokrasi dalam pandangannya tak ubahnya dengan sistem ekonomi pasar,

dimana para pemilih adalah konsumen sementara para politisi sebagai wiraswastawan. Pengertian yang tidak jauh berbeda di usung Sartoni, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana pengaruh kelompok mayoritas dijamin oleh kelompok minoritas yang dipilih dan berkompetisi dan kepadanya sistem itu dipercayakan (dalam Varma, 2001:211-215).

B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pada BAB I Pasal 1 *point (c)*, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan di *point (h)* Otonomi Daerah ialah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2000-243).

Menurut Ermaya Suradinata (2006:11-12) bahwa penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah

- kabupaten dan daerah kota sedang provinsi sangat terbatas.
- c. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah.
 - d. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi.
 - e. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - f. Azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
 - g. Tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal, antara lain;

1. Penataan Kewenangan
2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3. Pemberdayaan Daerah
4. Prasyarat Daerah Otonomi
5. Pola Daerah Otonomi

C. Masyarakat Pedesaan

Pengertian masyarakat sederhananya ialah kehidupan sosial yang berlangsung dalam suatu wadah (Narwoko dan Suyanto, 2006:124).

Menurut Robert Mac Iver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertibkan. Sedangkan rumusan Harolk J. Laski, bahwa masyarakat yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (dalam Budiardjo, 2004:33-34). Masyarakat juga disebut *community* yang diartikan sebagai masyarakat setempat, bisa merujuk kepada sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Community adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi penduduk di luar batas wilayahnya (Soekanto, 2006:142).

Dari beberapa pernyataan diatas, yang dimaksud masyarakat pedesaan adalah sekelompok masyarakat hukum yang tinggal disuatu daerah tertentu dengan corak kehidupan yang relatif sama dan saling mengenal yang diikat dengan kehidupan tata nilai adat-istiadat yang diakui dan dihormati secara bersama.

D. Partisipasi Politik

pendapat seorang guru besar Universitas George Mason yang bernama Robert P. Clark bahwa partisipasi politik diartikan berbeda-beda bergantung kepada kultur yang melandasi kegiatan partisipasi politik. Ditambahkan Clark yang dikutipnya dari pendapat Huntington dan Nelson bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Keith Davis mendefenisikan partisipasi politik sebagai *participation is defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him*

to contribute to group goals and share responsibility in them. Di sini di artikan sebagai suatu dorongan mental dan emosional dari seseorang atau kelompok yang menggerakkan mereka bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggungjawab (dalam K. Garna, 2000:249).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

A. Sejarah Kecamatan Kuantan Hilir

Zaman dahulu Kuantan Singingi dikenal sebagai sebutan Rantau Kuantan yang merupakan suatu daerah yang berada dibawah pemerintahan Datuk sebagai pemegang Teraju Adat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Daerah ini juga disebut Rantau Nan Oso Duo Pulua, artinya adalah rantau yang kurang satu dari dua puluh dengan demikian ada 19 Rantau yang tercakup di dalamnya, yaitu meliputi Kenegerian di sepanjang aliran sungai Kuantan yang dimulai dari Lubuk Ambacang di bagian hulu sampai ke Cerenti di bagian hilir (Hamidi, 1995:1). 19 Rantau yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dua diantaranya berada di Kecamatan Kuantan Hilir.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dimana pemerintahan yang tadinya berada ditangan Datuk, kini berubah bentuk menjadi sistem dan corak pemerintahan modern yang merupakan penjabaran atau Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku dinegara ini dan begitu juga halnya pada 19 Rantau yang kini sudah dibagi menjadi desa-desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi, Kuantan Hilir merupakan salah satu bagian dari wilayah Indragiri Hulu. Di namakan Kuantan Hilir pada waktu itu adalah ada tiga Kecamatan yang di aliri oleh Sungai Kuantan, yaitu Kecamatan

Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Kuantan Hilir yang terletak di daratan sebelah hilir Sungai Kuantan.

Dengan bergulirnya Era Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998, momen ini tidak di sia-siakan oleh tokoh dan kalangan masyarakat Rantau Kuantan dalam menyuarakan aspirasinya terhadap pembentukan Kabupaten baru. Perjuangan demi perjuangan yang di lalui pada saat itu pada akhirnya membuahkan hasil dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 pada tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi termasuk di dalamnya adalah masyarakat Kuantan Hilir. Nama Kabupaten Kuantan Singingi sendiri diambil dari dua aliran Sungai, yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi (Arsip Sekretariat Daerah Kab. Kuansing, 2004).

Awal berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi, Kuantan Hilir adalah salah satu Kecamatan Induk yang pada akhirnya di pecah menjadi tiga kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat dan Kecamatan Kuantan Hilir sendiri. Sekilas kita menelusuri dan melihat monografi Kecamatan Kuantan Hilir, bahwa wilayah ini merupakan kawasan pedesaan yang terdiri dari 26 Desa yang tergabung ke dalam dua Kenegerian, yaitu Kenegerian Koto Tuo 19 Desa 2 Kelurahan dan Kenegerian Koto Rajo 7 Desa. Kawasan pedesaan yang terdapat di Kuantan Hilir juga merupakan suatu kesatuan sistem masyarakat adat yang dirangkai dengan semboyan *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah*. Sedangkan Ibukota Kecamatan Kuantan Hilir berkedudukan di Baserah dan merupakan Ibukota Kecamatan terbesar kedua setelah Teluk Kuantan.

B. Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan Dalam Pemberian Suara

Tujuan dari adanya karakteristik responden ini adalah untuk memberikan gambaran tentang identitas-identitas responden yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian. Sedangkan yang akan dilihat untuk penentuan karakteristik responden tersebut adalah umur, pendidikan, dan pekerjaan responden. Penjelasan identitas responden dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai latar belakang kehidupan dan juga sebagai alat perbandingan di antara 42 responden yang di jadikan sebagai objek penelitian dan sehingga dengan adanya jawaban berupa karakteristik

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat berpartisipasi politik dalam pemberian suara. Sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan maka secara sederhananya maka penulis akan melihat dari beberapa faktor dan menjelaskan faktor-faktor mana saja yang paling dominan mempengaruhi sikap partisipasi politik masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada Pilkada Langsung Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor-faktor yang akan peneliti jelaskan tersebut, yaitu sebagai berikut;

1. Faktor Sosial Budaya

Masyarakat Kuantan Hilir sistem kehidupan sosialnya di dominasi dan di ikat oleh sistem adat yang berlaku. Sistem adat tersebut merupakan suatu nilai-nilai yang sudah lahir sejak "*Kampung atau Nagori*" dibuka. Nilai disini adalah suatu tata cara pergaulan yang sudah mendarah daging di masyarakat. Nilai-nilai tersebut bersumber dari adat istiadat berdasarkan hasil kesepakatan bersama anak cucu kemenakan. Setiap tata nilai sosial budaya yang ada akan menjadi pegangan hidup bagi kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Adapun nilai-nilai sosial

budaya yang menjadi kebiasaan dan terdapat pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Kuantan Hilir antara lain adalah; (a) rasa persatuan antara yang satu dengan yang lainnya, rasa persaudaraan yang tinggi, adanya rasa solidaritas dan tolong menolong antar warga, (b) struktur sosial budaya, dan (c) kekeluargaan antar suku.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Sebagaimana sosial dan budaya yang telah dijelaskan di atas, lingkungan keluarga merupakan proses awal menuju pembentukan lingkungan sosial. Sederhananya lingkungan keluarga adalah suatu komunitas yang terkecil dari kelompok masyarakat yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak yang di ikat berdasarkan hasil perkawinan yang syah. Sedangkan penyebutan kata keluarga pada masyarakat pedesaan memiliki makna yang luas. Dalam masyarakat pedesaan yang dikatakan keluarga dan sekeluarga adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan baik dari faktor perkawinan maupun kesukuan. Berikut ini yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah hubungan keluarga atas dasar perkawinan dan pengaruh pihak keluarga Ayah dan Ibu.

3. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

a. Ekonomi

Dan dibawah ini adalah pernyataan responden tentang pengaruh faktor ekonomi dalam bentuk tabel yang akan dilihat dari tiga karakteristik responden, yaitu karakteristik menurut umur pemilih, jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan yang terdapat pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Kuantan Hilir.

b. Pendidikan

Pendidikan dalam kehidupan sosial masyarakat adalah pilar utama, dengan pendidikan orang akan bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat secara politik banyak kalangan menilai juga akan berdampak pada tingkat kepartisipannya dalam politik, dan bagaimana halnya dengan tingkat partisipasi masyarakat pedesaan dalam pemberian suara pada Pilkada langsung Kuantan Singingi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada tabel IV.2 tentang karakteristik responden menurut tingkat pendidikan tercatat bahwa 69,05 % pendidikan masyarakat pedesaan adalah tingkat Dasar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak empat puluh dua responden dan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pedesaan untuk memilih (*pemberian suara*) lebih dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Hal ini terlihat bahwa dari indikator yang sudah dijelaskan pada beberapa tabel di BAB IV untuk faktor sosial budaya, yaitu (a) Nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebanyak 83,33 % responden baik berdasarkan tingkat usia, pendidikan dan pekerjaan responden lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut, (b) Keterlibatan struktur sosial budaya (*unsur Adat, Pemerintahan dan Ulama*) menyimpulkan bahwa sebanyak 32 responden atau lebih kurang 76,19 % pemilih mengakui keterlibatan unsur tersebut, sehingga hal itu berpengaruh terhadap perilaku pemilih masyarakat pedesaan, (c) Hubungan kesukuan (rasa primordialisme) dan sentimen kedaerahan juga masih berpengaruh terhadap partisipasi politik dalam pemberian suara, fenomena ini dapat kita lihat dari masih besarnya responden yang menyatakan berpengaruh yang tercatat sebesar 64,28 % dari empat puluh dua responden yang diteliti.

Untuk faktor lingkungan keluarga setidaknya ada beberapa yang menjadi

catatan bahwa tingkat partisipasi untuk faktor ini dari beberapa indikator yang jelas ternyata yang paling berpengaruh ialah (a) keluarga atas dasar hubungan perkawinan yang persentasenya tercatat sebesar 76,19 % atau sebanyak tiga puluh dua responden dari empat puluh dua yang diteliti, sedangkan (b) pengaruh pihak keluarga Ayah dan Ibu (Bako dan Mamak) tidak terlalu dominan yang hanya tercatat 40,48 % atau sekitar tujuh belas responden, di antara Bako dan Mamak tersebut yang berpengaruh adalah Mamak yaitu pihak keluarga Ibu yang persentasenya mencapai dua puluh tujuh responden atau 64,28 %.

Untuk faktor ekonomi (*pendapatan dan kualitas kehidupan*) sudah mulai membaik namun penilaian responden tidak terlalu berpengaruh terhadap partisipasi politik dalam pemberian suara, penilaian responden yang menyatakan berpengaruh hanya sebesar 45,24 %, sedangkan yang menyatakan tidak berpengaruh lebih besar yaitu 54,76 % pemilih. Sedangkan untuk faktor pendidikan masyarakat tercatat bahwa sebanyak 61,90 % responden pendidikan tidak mempengaruhi partisipasi pemberian suara, hal ini bisa dikutip dari pernyataan informan kunci yang menyatakan walaupun tingkat pendidikan formal masyarakat pedesaan rendah atau dengan perbandingan 70 % dari jumlah pemilih berpendidikan menengah pertama kebawah dan ternyata tidak mengurangi tingkat partisipasi pemberian suara pada Pemilihan Kepala Daerah langsung Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006, sekiranya jika dilihat perbandingan antara pengaruh pendidikan formal dengan non formal bahwa responden menjawab sebanyak dua puluh dua responden atau 52,38% pendidikan non formal lebih berpengaruh terhadap partisipasi politik dalam pemberian suara. Ini artinya bahwa faktor sosial budaya masyarakat pedesaan lebih berperan

dalam mempengaruhi pemberian suara dan ditambah dengan adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu

Disamping itu juga struktur masyarakat Desa dan tata nilai yang berlaku menjadi satu kesatuan sistem interaksi, komunikasi politik yang pada akhirnya akan melahirkan persamaan persepsi untuk menjatuhkan pilihan terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Adanya persamaan persepsi dalam pemberian suara, maka tipologi pemilih masyarakat desa adalah pemilih tradisional sebagian lagi adalah pemilih skeptis yang tidak mempunyai arah dan tujuan untuk memilih.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada semua

pihak khususnya masyarakat pemilih sebagai masukan dan pertimbangan dalam pemberian suara. Pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang kita semua sebagai pemilih hendaknya menggunakan hak pilih secara rasional dan tidak mengedepankan nilai primordial, kesukuan atau pengaruh dari struktur masyarakat.

Masa depan kepemimpinan Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada suara yang diberikan oleh masyarakat desa, oleh karena itu tugas dari pemerintah dan khususnya adalah lembaga independen yaitu KPUD sebagai penyelenggara PEMILU dan PILKADA lebih giat memberikan pendidikan dan sosialisasi politik untuk menciptakan masyarakat desa yang lebih cerdas, berwawasan luas, memiliki pandangan kedepan untuk menentukan pimpinan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Budiardjo Meriam, Prof., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Deden Faturahman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta, UMM Press, 2004
- Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Garna Judistira K., Prof., PhD., *Metoda Penelitian Sosial 'Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Primako Akademika, 2000.
- Harun Rochajat, Ir., Med., PhD., Sumarno AP., Drs., S.H., *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*, Bandung, Mandar Maju, 2006.
- Huntington P. Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1984
- Kartono Kartini., Dr., *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju, 1996.

Mahfud MD., Moh., Prof. Dr. SH, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia “ Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan ”*, Rineka Cipta, 2003

Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001

Mas’oed, Mochtar, *Studi Hubungan Internasional ; Tingkat Analisis Teorisi*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, 1990

Moleong, Lexi J. Dr. MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000

Narwako Dwi. J., Suyanto Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology ; Ilmu Pemerintahan Baru*; Edisi I, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Pasaribu. Dra., B. Simanjuntak, Drs. SH., *Sosiologi Pembangunan*, Bandung, Tarsito, 1986
Priyono AE., dkk, *Menjadikan Demokrasi Bermakna “Masalah dan Pilihan Di Indonesia*, Jakarta, Demos, 2007

Rus Michael, Althoff Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik, diterjemahkan Oleh Kartini Kartono*, Jakarta, Rajawali Press, 2003.

Sajogyo, Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Suradinata Ermaya, Prof., Dr., *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Jakarta, Suara Bebas, 2006.

Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992

Suryabrata, Sumadi, BA., Drs., Ed.S., Ph.d., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Varma. SP, *Teori Politik Modern*, Terjemahan Yohanes Kritiarto SL, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Widjaja., HAW., Prof., Drs., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 5 Pekanbaru, Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Riau, 2006.

KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2006

